

BAB I

PENDAHULUAN

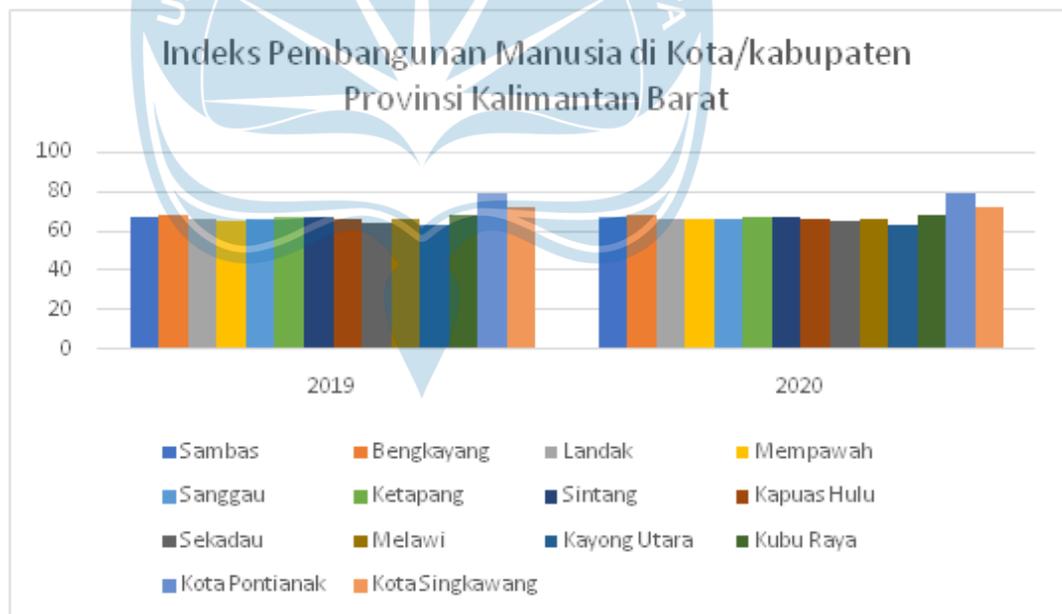
1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi suatu daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan peluang pemerintah daerah (beserta partisipasi masyarakatnya dengan menggunakan sumber daya yang ada) di mana perlu adanya pertimbangan dalam menaksir potensi setiap sumber daya yang diperlukan untuk guna meningkatkan perekonomian daerah itu sendiri (Arsyad, 2010). Permasalahan pembangunan suatu daerah merupakan sebuah implikasi penting dalam pengaruhnya terhadap perekonomian secara global. Adanya krisis akibat pandemi Covid-19 ini juga menjadi sebuah tantangan tersendiri dalam pencapaian pembangunan suatu daerah. Selain itu, luasnya kawasan wilayah Indonesia yang berbeda-beda mendorong setiap daerah dalam menangkap potensi yang dimiliki, salah satunya yaitu potensi sumber daya manusia (Tjiptoherijanto, 2002).

Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tepat dapat mendorong terciptanya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, manusia bertindak sebagai pelaku serta modal dalam suatu pembangunan. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sendiri merupakan salah satu modal yang dapat disejajarkan dengan modal fisik atau sumber daya alam dalam

menciptakan suatu output. Oleh karena itu, tinggi rendahnya IPM setiap daerah menjadi hal penting yang perlu diperhatikan.

Berbagai paradigma mengenai peningkatan IPM menjadi sebuah sorotan daerah dalam mengambil kebijakan yang tepat guna mendorong peningkatan IPM. Sama halnya dengan daerah lain, Kalimantan Barat juga memiliki tujuan pembangunan ekonomi dalam rangka pencapaian kesejahteraan masyarakatnya. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Barat tergolong rendah dibandingkan dengan provinsi lain dengan perolehan angka sebesar 67,66% (BPS, 2021). Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Barat sendiri menduduki peringkat lima terendah di Indonesia.



Sumber : BPS, 2021

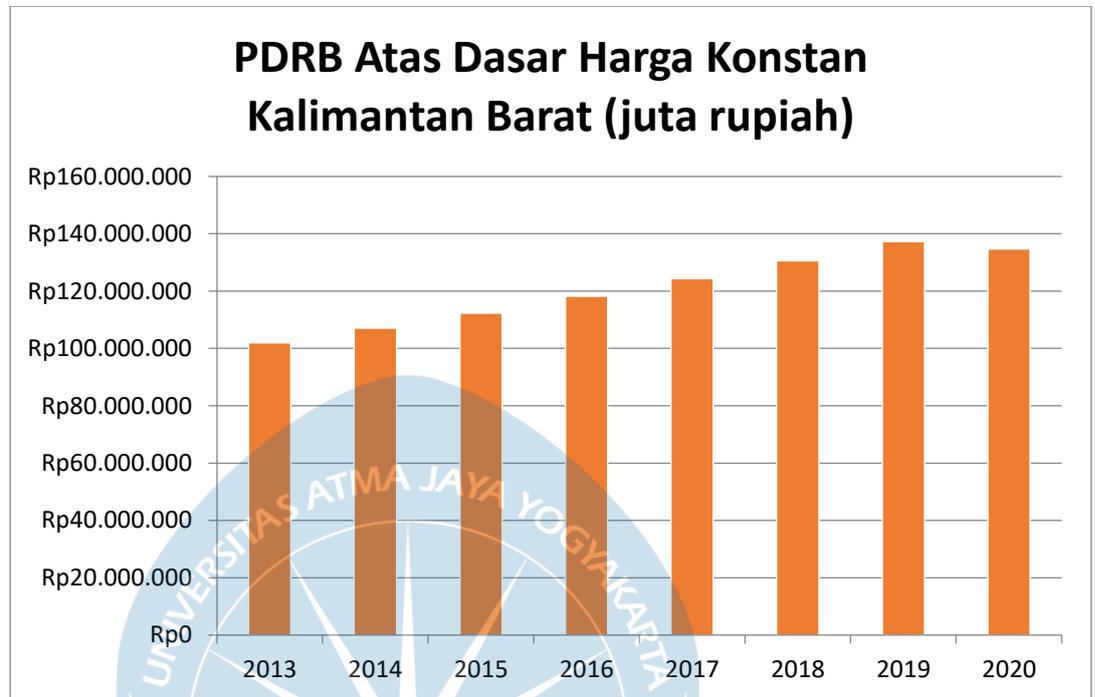
Gambar 1.1

Indeks Pembangunan Manusia di Kota/kabupaten Provinsi

Kalimantan Barat Tahun 2019-2020

Berdasarkan Gambar 1.1 dapat dilihat perkembangan IPM Provinsi Kalimantan Barat cenderung mengalami pertumbuhan yang lambat. Berdasarkan BPS, (2021) angka IPM Kalimantan Barat pada Kabupaten Kayong Utara Pada tahun 2020 hanya menyentuh angka 62,66 % di mana angka tersebut tergolong rendah dan hampir menyentuh IPM dengan kategori rendah. Hal ini mendorong upaya lebih dalam memahami faktor-faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan IPM lebih lanjut.

Salah satu indikator penting dalam mendorong pertumbuhan Indeks Pembangunan manusia yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). UNDP (2011) mengungkapkan bahwa kualitas pembangunan manusia dapat mengalami peningkatan apabila didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta pemerataan pendapatan sehingga pertumbuhan ekonomi akan efektif dalam memperbaiki pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur melalui laju pertumbuhan PDRB. PDRB sendiri merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Pertumbuhan PDRB per kapita yang tinggi menunjukkan tingkat pendapatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan tingginya PDRB per kapita maka tingkat standar kelayakan hidup masyarakat dan daya beli akan meningkat, sehingga peningkatan ini akan mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia.



Sumber: BPS, 2020

Gambar 1.2

PDRB Kalimantan Barat tahun 2013-2020

Berdasarkan gambar 1.2 dapat dilihat bahwa PDRB Provinsi Kalimantan Barat cenderung mengalami pertumbuhan yang lambat. Penurunan PDRB juga terjadi pada 2019- 2020 dengan selisih sebesar 2.499.707 juta rupiah. Tahun 2020 menunjukkan bahwa PDRB mengalami penurunan yang disebabkan krisis akibat pandemi Covid-19. Hal ini didukung pula oleh penelitian menurut Muliza et al., (2017) yang menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh positif terhadap IPM. Sejalan dengan temuan sebelumnya Deb, (2015) juga menunjukkan bahwa GDP

per kapita secara statistic dapat menjadi indikator kemajuan *HDI*. Implikasi lain Zainuddin, (2015) menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh negatif terhadap IPM. Perlu adanya pemahaman dalam mengatasi penurunan laju PDRB sehingga tidak memberikan dampak negatif nantinya untuk perkembangan Indeks Pembangunan Manusia.

Tingkat kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat berdasarkan upah minimum regional tiap kota/kabupaten yang didapat. Kebijakan upah minimum merupakan sistem pengupahan yang telah banyak diterapkan di berbagai Negara. Menurut Simanjuntak, (2001) dalam Gianie, (2009) menjelaskan upah minimum merupakan alat proteksi bagi pekerja untuk mempertahankan agar nilai upah yang diterima tidak menurun guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu upah minimum juga sebagai alat proteksi bagi perusahaan untuk mempertahankan produktivitas pekerja. Upah minimum telah ditetapkan berdasarkan pada kebutuhan hidup layak berupa kebutuhan akan pangan. Upah minimum sendiri memiliki perbedaan nominal sesuai dengan lokasi daerah masing. Berikut data mengenai tingkat UPM terendah dan tertinggi di Indonesia.

Tabel 1.1**UMP Berdasarkan Peringkat Terendah dan Tertinggi Tahun 2020**

No	UMP Tertinggi		UMP Terendah	
1	DKI Jakarta	Rp 4.276.349	Yogyakarta	Rp 1.704.607
2	Papua	Rp 3.516.700	Jawa Tengah	Rp 1.742.015
3	Sulawesi Utara	Rp 3.310.722	Jawa Timur	Rp 1.768.777
4	Bangka Belitung	Rp 3.230.022	Jawa Barat	Rp 1.810.350
5	Papua Barat	Rp 3.184.225	Nusa Tenggara Timur	Rp 1.945.902
6	Nanggroe Aceh Darussalam	Rp 3.165.030	Nusa Tenggara Barat	Rp 2.183.883
7	Sulawesi Selatan	Rp 3.103.800	Bengkulu	Rp 2.213.604
8	Sumatera Selatan	Rp 3.043.111	Sulawesi Tengah	Rp 2.303.710
9	Kepulauan Riau	Rp 3.005.383	Kalimantan Barat	Rp 2.399.698

Sumber : Kementerian Ketenagakerjaan, 2019

Perbandingan tingkat upah minimum rata-rata pada tabel 1.1 menunjukkan terdapat kesenjangan yang tinggi pada daerah dengan UMP tertinggi dengan terendah tahun 2020. Dapat dilihat bahwa Provinsi Kalimantan Barat sendiri merupakan salah satu provinsi dengan nilai UMR terendah se Indonesia. Peningkatan upah minimum regional sendiri dapat meningkatkan kehidupan hidup layak, sehingga standar hidup layak dan daya beli masyarakat juga mengalami peningkatan sehingga berdampak positif pada Indeks Pembangunan Manusia. Megantara et al., (2020) juga menunjukkan bahwa UMR memiliki pengaruh positif terhadap IPM. Hal ini

tentu mendorong agar terciptanya peningkatan lebih pada UMR Provinsi Kalimantan Barat guna memberikan dampak positifnya terhadap IPM.

Indikator lain yang mempengaruhi IPM yaitu kemiskinan. Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Bappenas, 2004). Penelitian sebelumnya oleh Invantoro & Efriyenti, (2019) yang menunjukkan bahwa kemiskinan berpengaruh positif terhadap IPM. Implikasi lain kemiskinan dapat memberikan efek negatif terhadap IPM. Hal ini didukung oleh penelitian Muliza et al., (2017) yang menunjukkan bahwa kemiskinan berpengaruh negatif terhadap IPM. Berbeda dengan penemuan sebelumnya Utama et al., (2015) menunjukkan bahwa kemiskinan tidak berpengaruh terhadap IPM.

Beberapa implikasi kebijakan dapat diambil guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia, hal ini menjadi bukti ada berbagai dampak yang ditimbulkan dari berbagai faktor yang dapat mempengaruhinya. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis Faktor-faktor yang mempengaruhi IPM dengan menggunakan variabel yang diambil yaitu, PDRB, UMR, dan Kemiskinan. Dengan judul penelitian ini yaitu “Analisis Pengaruh PDRB, UMR, dan Kemiskinan Terhadap IPM di Kota/ Kabupaten Kalimantan Barat tahun 2015-2020”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang telah di susun dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Reginal Bruto (PDRB) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota dan Kabupaten Kalimantan Barat pada tahun 2015-2020?
2. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Reginal (UMR) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota dan Kabupaten Kalimantan Barat pada tahun 2015-2020?
3. Bagaimana pengaruh Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota dan Kabupaten Kalimantan Barat pada tahun 2015-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Produk Domestik Reginal Bruto (PDRB) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota dan Kabupaten Kalimantan Barat pada tahun 2015-2020.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Upah Minimum Reginal (UMR) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota dan Kabupaten Kalimantan Barat pada tahun 2015-2020.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota dan Kabupaten Kalimantan Barat pada tahun 2015-2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk:

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi dan tambahan referensi, dan masukan untuk menentukan suatu kebijakan pada bidang pembangunan ekonomi regional dalam sektor SDM.

2. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan dan mengaplikasikan pengetahuan dan keilmuan di bidang ekonomi secara makro. Serta dapat memahami dan menjelaskan faktor yang dapat mempengaruhi perubahan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam Pembangunan Ekonomi.

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi dan tambahan pengetahuan pada bidang Pembangunan Ekonomi dan menambah pengetahuan mengenai faktor-faktor yang dapat berpengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

1.5 Hipotesis

Hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Diduga Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota dan Kabupaten Kalimantan Barat pada tahun 2015-2020.

2. Diduga Produk Upah Minimum Reginal (UMR) berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota dan Kabupaten Kalimantan Barat pada tahun 2015-2020.
3. Diduga Kemiskinan berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota dan Kabupaten Kalimantan Barat pada tahun 2015-2020.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari skripsi yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam Bab 1 ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab 2 berisi mengenai Tinjauan Pustaka yaitu teori mengenai Indeks Pembangunan Manusia, Produk Domestik Regional Bruto, Kemiskinan, dan UMR. Selanjutnya Penelitian Terdahulu, Kerangka Berfikir dan Hipotesis Penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam Bab 3 ini membahas mengenai lokasi, data dan sumber data, batasan operasional, model, dan alat analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab 4 ini memberikan uraian tentang hasil dan pembahasan dari penelitian, hasil dari pengujian hipotesis, dan interpretasi pembahasan sesuai dengan ruang lingkup fokus penelitian. Pembahasan lebih lanjut dari hasil berbagai macam uji juga akan dikemukakan dalam Bab 4 ini.

BAB V: PENUTUP

Bab 5 ini membahas kesimpulan dan juga saran yang di dapat dari penelitian ini.

